

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah organisasi sosial-kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Islam berkembang menjadi *tag line* Muhammadiyah yang menunjukkan responnya terhadap keadaan zaman. Dibandingkan dengan beberapa gerakan sosial-keagamaan internasional lainnya, Muhammadiyah termasuk yang paling tua, sebut saja Ikhwanul Muslimin (1928), Hizbut Tahir (1953), dan Ghulen Movement (1958). Beberapa pengamat, intelektual, dan peneliti Muhammadiyah memberikan pertanyaan penting mengenai prospek Muhammadiyah di masa yang datang. Amin Abdullah misalnya memandang bahwa Muhammadiyah harus keluar dari determinasi pelayanan terhadap lokal-keindonesiaan supaya mampu melampaui batas geografi-teritorial.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan tantangan abad ke-2 Muhammadiyah, Mitsuo Nakamura dan Martin van Bruinessen melihat Muhammadiyah harus mempelajari bagaimana The Ghulen Movement melakukan internasionalisasi pemikiran Islam sehingga Muhammadiyah mampu melihat perannya secara lebih luas. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsudin menurut sebagian kalangan memberi penguatan terhadap agenda internasionalisasi Muhammadiyah pemikiran Islam. Ahmad Najib Burhani menyatakan terdapat tiga konteks proses internasionalisasi Muhammadiyah. Pertama, muncul

---

<sup>1</sup> Abdul Mu'ti, *Islamic Moderation in Indonesia; Muhammadiyah's Experience*, terj. Alpha Amirrachman, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), hlm. 1

jejaring Muhammadiyah di luar negeri melalui kebijakan pendirian Pimpinan Cabang Istimewa (PCI). Kedua, internasionalisasi Muhammadiyah dalam pengertian partisipasinya terhadap berbagai isu dan aktivitas global. Ketiga, internasionalisasi Muhammadiyah dalam konteks relasi lembaga-lembaga pendidikan dengan dunia akademik global.<sup>2</sup>

Sejak awal berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah telah mengalami proses perluasan lembaga. Terhitung sejak 1920an, jejaring Muhammadiyah di berbagai wilayah Koloni ikut didirikan.<sup>3</sup> Jama'ah Muhammadiyah meningkat drastis dari 4.000 orang pada 1920an dan mencapai 250.000 orang pada tahun 1938. *Hoofd Bestur* Muhammadiyah saat itu mengajukan permohonan pendirian Cabang-Cabang Muhammadiyah di seluruh Hindia-Belanda. Muhammadiyah kemudian menyebar dari Pulau Jawa dan Sumatera, kemudian menyebar ke Sulawesi, Kalimantan, hingga bagian timur Indonesia.

Pimpinan Cabang Istimewa (PCIM) merupakan salah-satu manifestasi yang berkaitan secara historis dengan berbagai proses pengembangan model jaringan dan kelembagaan Muhammadiyah. Narasi dasar pendirian PCIM dilandasi oleh tujuan “menjalin silaturahmi” antar warga Muhammadiyah yang berdomisili di benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, serta Amerika. Dalam publikasi resmi *Profil Muhammadiyah 2005*, PCIM bukan bagian dari struktur

---

<sup>2</sup> Ahmad Najib Burhani, “Internasionalisasi Muhammadiyah”, *Tabloid Kauman*, Edisi 4: Maret-April 2015.

<sup>3</sup> Dalam konteks Negara Kolonial, batas kekuasaan Belanda sesungguhnya masih diperdebatkan. Koloni yang berada secara penuh di bawah pengaruh penuh kerajaan Belanda pada masa itu adalah pulau Jawa. Sumatera dikuasai oleh Inggris dari sisi ekonomi-politik. Muhammadiyah diperkenalkan di Minangkabau oleh Haji Rasul pada tahun 1925, sebuah kawasan yang penuh dengan sejarah perubahan sosial, dan hingga menjelang masa kemerdekaan tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol Negara Kolonial. Lih, M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

organisasi Muhammadiyah melainkan komunitas yang diberi nama Ikatan Keluarga Muhammadiyah (IKM). PP Muhammadiyah kemudian memperkuat eksistensi IKM menjadi PCIM melalui kebijakan penetapan nomenklatur Cabang Istimewa hingga ke tingkat Ranting Istimewa (PRIM).

Gejala internasionalisasi Muhammadiyah juga merupakan bagian implikatif dari keyakinan ideologis bahwa Islam merupakan “rahmatan lil ‘alamin”, sehingga bermakna praktis “rahmat bagi alam semesta” yang banyak diungkap misalnya oleh Amin Abdullah sebagai tanggungjawab “warga dunia” (*global citizenship*). Ekspresi keagamaan dakwah Muhammadiyah dengan demikian tidak lagi dibatasi oleh spasilitas negara-bangsa, melainkan telah menjadi bagian dari proses globalisasi gerakan Islam.

Model internasionalisasi Muhammadiyah dapat digambarkan sebagai pengaruh dari sebaran variasi geografis anggota atau simpatisan Muhammadiyah. Meningkatnya jumlah kader Muhammadiyah yang tersebar di berbagai Negara berperan besar dalam proses pembentukan PCIM. Kendati demikian, PP Muhammadiyah juga memegang peran penting dalam proses internasionalisasi Muhammadiyah. PP Muhammadiyah terlibat aktif baik dalam tingkat individu atau secara kelembagaan memotivasi kadernya untuk mendirikan PCIM.

Kajian mengenai internasionalisasi Muhammadiyah penting karena dua konteks utama. Pertama, kajian atas tendensi internasionalisasi Muhammadiyah akan membuka pemahaman atas perilaku organisasi dalam merespon minat kader dan simpatisan Muhammadiyah untuk mendirikan

organisasi ini di negara mukimnya masing-masing. Dengan demikian memperlihatkan posisi Muhammadiyah yang tidak pasif dalam penyebaran ideologi lintas negara-bangsa.

Kedua, tendensi internasionalisasi dalam Muhammadiyah membuktikan bahwa gerakan ini fokus pada pembentukan *Islamic Society* daripada *Islamic State*.<sup>4</sup> Muhammadiyah mengambil peran sebagai partisipan aktif dalam berbagai kepentingan internasional, dan memperkuat basis gerakannya dengan membentuk komunitas sebagai bentuk kontak langsung. Hal ini memperlihatkan horizon pemahaman keislaman Muhammadiyah yang luas melampaui kebutuhan partikular, dan fokus pada misi dakwah *Islam rahmatan lil 'alamin*.<sup>5</sup> Dengan demikian, tendensi internasionalisasi memperlihatkan wujud kerja organisasi yang meluas dari Muhammadiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok yaitu: (1). Bagaimana proses internasionalisasi Muhammadiyah yang mengemuka melalui pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa (PCIM) oleh PP Muhammadiyah?.

---

<sup>4</sup> Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies; Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Abad Kedua*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 90.

<sup>5</sup> Haedar Nashir, *Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 27

## C. Kerangka Dasar Teori

### 1. Internasionalisasi Muhammadiyah

Konsep internasionalisasi seringkali digunakan secara bergantian dengan globalisasi. Oleh karena itu penting untuk menekankan perbedaan-perbedaan di antara keduanya terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk membaca jaringan struktural Muhammadiyah. Konsep internasionalisasi yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan kategori umum gerakan-gerakan Islam transnasional yang sekaligus memperlihatkan proses internasionalisasinya masing-masing. Kendati demikian, konsep internasionalisasi pada umumnya dipahami dalam konteks gerakan-gerakan yang mengekstraksi ideologi Islam sebagai upaya untuk menciptakan citra Islam yang maju atau perjuangan menciptakan negara Islam, yang tentu saja dilakukan melalui proses internasionalisasi.

Secara definisi, internasionalisasi berkembang dan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dan sektor. Dalam diskursus ekonomi misalnya, ditinjau dari sudut pandang korporasi multinasional dan investasi luar negeri langsung, internasionalisasi diartikan sebagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuka cabang/perusahaan di negara-negara lain.<sup>6</sup> Artinya, dalam konteks ekonomi, internasionalisasi dilihat sebagai sebuah proses dan upaya menembus batas-batas konvensional negara bangsa dalam rangka pengurangan ongkos produksi dan perluasan cakupan bisnis.

---

<sup>6</sup> Murat Ali Dulupcu & Onur Demirel, *Globalization and Internationalization*, (European Commission, 2005)

Dari sudut pandang pendidikan, ada penjelasan lain yang juga cukup menarik. Jane Knight, Professor di University of Toronto, mengatakan:

*“Internasionalisasi pada tingkatan nasional, sektoral, dan institusional didefinisikan sebagai proses pengintegrasian dimensi internasional, interkultural, dan global pada tujuan dan fungsi pendidikan tinggi.”*<sup>7</sup>

Kedua pendekatan di atas—ekonomi dan pendidikan—menunjukkan ada kesamaan prinsip dalam menjelaskan internasionalisasi. Keduanya sama-sama memandang internasionalisasi sebagai sebuah proses interaksi sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik yang dilakukan melalui peleburan batas-batas konvensional negara bangsa. Definisi-definisi di atas tentang internasionalisasi serupa dengan aplikasi internasionalisasi yang ada pada Muhammadiyah—sebuah proses interaksi kebudayaan dan sosial pada tataran global yang dilakukan dengan perluasan cabang-cabang organisasi.

Beberapa variasi gerakan sosial yang digambarkan mengalami internasionalisasi pada umumnya identik dengan ciri-ciri sebagai “jaringan” (Hannerz, 1996), “bergerak di bidang sosial” (Levitt dan Glick Schiller, 2004), “ruang sosial” (Faist, 2000, 2011) dan sebagai “rantai migrasi” (Werbner, 2002).<sup>8</sup> Secara teoritis, konsep internasionalisasi melibatkan banyak dimensi, yang pada akhirnya tidak hanya menampilkan

---

<sup>7</sup> Jane Knight, *Internationalization: Concepts, Complexities, and Challenges*, (Springer International, 2007)

<sup>8</sup> Ato Quayson, dan Girish Daswani (Ed), *A Companion to Diaspora and Transnationalism*, (West Sussex: Blackwell Publishing, 2013), hlm. 6

satu pengertian formal. Konsep internasionalisasi juga berkaitan erat dengan sejumlah istilah lain yang digunakan secara luas dalam lapangan penelitian globalisasi, ekspansi, diaspora atau migrasi.

Penggunaan konsep internasionalisasi terhadap gerakan Islam memuat berbagai dimensi seperti keterlibatan relasi antara basis gerakan dan negara, atau budaya dan budaya (*culture to culture*). Hal ini misalnya terjadi pada Salafi yang didukung oleh Pemerintah Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin yang berakar kuat pada tradisi politik gerakan Mesir. Contoh lainnya The Gulen Hizmet di Turki yang hingga kini sudah memiliki 140 lembaga pendidikan, baik yang didirikan langsung ataupun yang terinspirasi dari Fethullah Gulem.

Gerakan Islam internasional seperti The Gulen Hizmet memberikan informasi karakteristik internasionalisasi pemikiran islam melalui proses transnasionalisasi.<sup>9</sup> Pertama, secara umum gerakan transnasional adalah gerakan kelompok masyarakat sipil yang mewakili identitas sebagai kelompok islam yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kolektif di tingkat internasional. Kedua, gerakan transnasional terlibat aktif dalam melakukan dialog lintas bangsa atau negara. Ketiga, gerakan transnasional memperluas diskursusnya melalui *framing* isu, pada umumnya berkaitan dengan isu-isu perempuan, gender, demokrasi, multikulturalisme, hingga proses transformasi sosial. Keempat, mengembangkan bentuk kontak

---

<sup>9</sup> Lih, Sophia Pandya, dan Nancy Gallagher, *The Gülen Hizmet movement and its transnational activities; case studies of altruistic activism in contemporary Islam*, (Florida: BrownWalker Press, 2012).

langsung dengan negara yang berkaitan melalui pendirian komunitas, masjid, atau lembaga pendidikan.

Meskipun tidak dapat disebut memiliki tendensi transnasional, tetapi Muhammadiyah dapat dibaca proses internasionalisasinya sebagaimana yang terjadi pada The Gulen Hizmet. Pra kondisi proses internasionalisasi Muhammadiyah terdiri atas tiga domain berikut.<sup>10</sup> Pertama, melalui pemanfaatan ruang publik. Muhammadiyah memiliki website dan majalah terbitan berkala, dan akses terhadap ruang publik yang luas melalui ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) serta aksesnya terhadap proses politik Indonesia. Kedua, Muhammadiyah berhasil membentuk ketahanan komunitas melalui berbagai inisiasi advokasi sosial hingga program filantropi yang kuat. Ketiga, domain kehidupan beragama transformatif yang menekankan proses aktualisasi spiritual melalui peran-peran sosial.

Menurut Najib Burhani mengutip Fred Halliday (2015), terdapat tiga konsep internasionalisasi yang dapat digunakan untuk membaca Muhammadiyah. Pertama adalah internasionalisasi radikal, yaitu internasionalisasi yang ditujukan dengan misi “mengubah dunia”. Kedua, internasionalisasi hegemonik, yakni proses penguasaan dunia melalui penyebaran perangkat ideologis. Internasionalisasi hegemonik dilakukan dengan membawa ideologi dari suatu tempat untuk diterapkan pada tempat yang lainnya tanpa proses asimilasi. Ketiga, internasionalisme liberal, yakni proses penyebaran ideologi sebagai bentuk keniscayaan akibat

---

<sup>10</sup> Lih, Zakiyuddin Baidhawiy, *The Muhammadiyah's Promotion of Moderation*, the American Journal of Islamic Social Science, 07/2015, Vol. 32, Issue 3.



globalibalisasi. Internasionalisme liberal menitikberatkan pada proses interaksi, pertukaran, dan distribusi ide, daripada membawa misi radikal atau hegemonial.

## 2. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM)

Konsep “pimpinan cabang” pada mulanya merujuk pada jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kecamatan (*sub-district*). Konsep ini secara tidak langsung juga berarti garis koordinasi pimpinan cabang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan jenjang kabupaten (*district*) dan provinsi. Perubahan konsep “pimpinan cabang” dapat terlihat dari laporan organisasi berbentuk profil tahun 2010. PCIM merupakan bagian dari “jama’ah Muhammadiyah”, tidak berubah dari laporan profil Muhammadiyah tahun 2000. Kendati demikian, dalam laporan profil Muhammadiyah tahun 2010, istilah “Cabang Istimewa” sudah digunakan setelah tiga tahun berdirinya PCIM di Malaysia dan Jepang.

**Tabel Data**  
**Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah<sup>11</sup>**

<b>Benua</b>	<b>Tahun Berdiri</b>	<b>Nama PCIM</b>
Asia	18 Juli 2007/ 23 Oktober 2015	PCIM Kuala Lumpur/ PCIM Malaysia
	8 Mei 2008	PCIM Jepang
	10 Agustus 2005	PCIM Iran
	26 Mei 2009	PCIM Islamabad Pakistan
	25 Februari 2014	PCIM Taiwan
Afrika	10 Desember 2015	PCIM Tunisia
	19 Oktober 2002	PCIM Kairo/Mesir
	19 Mei 2007	PCIM Libya
	7 Januari 2006	PCIM Khartoum-Sudan
Eropa	23 Maret 2007	PCIM Inggris Raya
	9 Februari 2008	PCIM Perancis
	22 Januari 2007	PCIM Jerman
	4 Desember 2006	PCIM Belanda
	12 Februari 2016	PCIM Turki
Amerika	13 Maret 2008	PCIM Amerika
Rusia	7 Desember 2012	PCIM Rusia
Australia	4 Juni 2009	PCIM Australia

PCIM dianggap sebagai bagian dari “amal baru” pasca perayaan 100 tahun Muhammadiyah. Terdapat lima peran PCIM. Pertama, sebagai penyelenggara silaturahmi antar anggota, warga, dan simpatisan

---

<sup>11</sup> Data diolah dari dokumen-dokumen penerbitan SK Pendirian PCIM oleh PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah. Kedua, menjadi mediator antara Persyarikatan dengan pemerintah dan lembaga lain setempat. Ketiga, sebagai forum peningkatan kualitas dan kuantitas anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Keempat, menjadi media pembinaan organisasi dan ideologi Muhammadiyah. Kelima, sebagai pelaksana dakwah serta pengembangan syiar Islam sesuai dengan paham dalam Muhammadiyah.<sup>12</sup>

Embrio awal PCIM adalah keputusan No. 84/KEP/I.O/B/2003 Tentang Pembentukan Organisasi Ikatan Keluarga Muhammadiyah di Luar Negeri yang ditetapkan 10 November 2003. Dasar pembuatan keputusan ini adalah Anggaran Dasar Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1); Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 ayat (1); dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 137/KEP/I.O/B/2003 tentang Pengesahan Berdirinya Cabang Ikatan Keluarga Muhammadiyah Kairo – Mesir, sebagai contoh IKM yang pertama.

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan faktor dominan faktor dominan dalam membentuk proses internasionalisasi Muhammadiyah.
2. Partisipasi aktif jama'ah Muhammadiyah di luar Indonesia mendorong penerbitan kebijakan PP Muhammadiyah atas eksistensi PCIM.

---

<sup>12</sup> Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2013), hlm. 32.

3. Landasan konstitusional organisasi yang kuat meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumat Tangga Muhammadiyah memungkinkan PP Muhammadiyah untuk menerbitkan Kebijakan mendirikan PCIM.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian mengenai proses internasionalisasi Muhammadiyah dilakukan melalui analisa atas kebijakan-kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mendorong perluasan pembentukan jama'ah Muhammadiyah di luar Indonesia. Dengan demikian penelitian ini memanfaatkan data yang berasal dari telaah atas sejumlah dokumen sebagai unit analisa, dan wawancara mendalam mengenai dasar premis pengambilan kebijakan.

Penelitian ini dimungkinkan dengan menetapkan area unit analisa dan unit eksplanasi.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan analisa korelasionis, yakni dengan unit analisa melalui atas proses pembuatan kebijakan pembentukan PCIM sebagai bagian dari proses internasionalisasi Muhammadiyah.

<b>Unit Analisa</b>	<b>Unit Eksplanasi</b>
Kebijakan Internasionalisasi Muhammadiyah	Proses pembuatan keputusan kebijakan membentuk PCIM

### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk; (1). Memahami proses pembentukan jaringan internasional Muhammadiyah sebagai indikator awal gerakan internasionalisasi Muhammadiyah. (2). Memahami kebijakan-kebijakan Muhammadiyah yang

---

<sup>13</sup> Lih, Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

berkaitan dengan pendirian Pimpinan Cabang Istimewa (PCIM) sebagai cara awal untuk mengetahui spasialitasnya bagi Muhammadiyah

## **G. Tinjauan Pustaka**

Muhammadiyah sejak lama sudah diidentifikasi sebagai gerakan sosial keagamaan yang mengadvokasi pendidikan, kesehatan, hingga filantropi (M.T. Arifin, 1991; Kahin, 2013; Peacock, 2016; Nakamura, 2012; Fauzia, 2016). Keberadaan Muhammadiyah dengan demikian harus mempertimbangkan dimensi yang ada dari kompleksitas kerja-kerja organisasi. Karakteristik dan konteks tertentu ikut membentuk identitas Muhammadiyah. Oleh karena itu, banyak studi mengenai Muhammadiyah ditinjau dari aspek identitasnya sebagai gerakan dakwah Islam.

Studi mengenai Muhammadiyah dari perkembangan keorganisasian sangat jarang dibahas. Persoalannya berpangkal dari tidak banyak studi yang cukup memadai untuk memotret perkembangan organisasi Muhammadiyah. Belakangan ini, studi mengenai perkembangan organisasi dari aspek struktur organisasi yang memperlihatkan dinamika akibat formasi globalisasi mutakhir dan teknologi serta padatnya interaksi antar negara seharusnya secara relatif memberi pengaruh tertentu pada Muhammadiyah.

Salah-satu karya yang sistematis membahas Muhammadiyah di antaranya ialah Alfian dengan *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism* (1969); Mitsuo Nakamura *The Crescent Arises over the Banyan Tree* (2012); James L. Peacock *Purifying*

*the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (1978); dan M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (2016).

Kajian yang secara khusus terhubung langsung dengan kebijakan PP Muhammadiyah dalam mendorong pembentukan PCIM tidak banyak ditemukan. Kendati demikian, beberapa kajian telah membuka topik mengenai arah gerak Muhammadiyah menjadi organisasi internasional. Kajian-kajian tersebut menganalisa peran Muhammadiyah di tingkat internasional, serta memberi informasi komparatif mengenai posisi Muhammadiyah dengan gerakan Islam internasional lainnya. Kajian-kajian ini pada akhirnya memberi jalan bagi penelitian transnasional Muhammadiyah.

Kajian yang pertama memperlihatkan Muhammadiyah terlibat dalam mempromosikan gagasan pemikiran Islam progresif, dan berada dalam kapasitas yang serupa dengan gerakan Islam internasional lainnya semacam The Gulen Movement. Kedua, peran internasional Muhammadiyah dalam bidang filantropi. Ketiga, peran internasional Muhammadiyah dalam pembentukan *civil society* melalui advokasi kepentingan-kepentingan komunitas muslim di luar Indonesia.<sup>14</sup>

Penelitian ini dengan demikian memiliki perbedaan khusus dengan kajian-kajian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menunjukkan suatu topik penelitian yang jarang dibahas, yakni proses internasionalisasi dalam Muhammadiyah.

Kedua, penelitian ini mengkaji tendensi internasionalisasi Muhammadiyah

---

<sup>14</sup> Beberapa kajian yang dapat disebutkan antara lain; Greg Barton, "The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: progressive Islamic thought, religious philanthropy and civil society in Turkey and Indonesia" *Islam and Christian-Muslim Relations*, 07/2014, Vol. 25, Issue 3; Surwandono, "Relevansi Pelembagaan Ekonomi Berbasis Syariah Pada Masyarakat Muslim Mindanao", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4 Edisi 1, April 2005.

melalui kebijakan pengembangan jaringan struktural (PCIM). Ketiga, penelitian ini membahas perkembangan PCIM dalam rentang waktu 2002 hingga 2016 dari proses penetapan kebijakan internal Muhammadiyah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri atas empat bab. **Bab I** membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian atas penelitian sebelumnya, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan hipotesa.

**Bab II** membahas kerangka dasar pemahaman atas model kebijakan pengembangan organisasi yang digunakan oleh Muhammadiyah. Bab II membahas ideologi Muhammadiyah yang memungkinkan munculnya proses internasionalisasi Muhammadiyah.

**Bab III** menganalisa sejumlah kebijakan PP Muhammadiyah yang diterbitkan untuk membentuk PCIM. Bab III meliputi kajian mendalam atas unit analisa dan unit eksplanasi.

**Bab IV** memaparkan kesimpulan penelitian, dan rekomendasi bagi stakeholder, termasuk di dalamnya adalah memberi masukan bagi pengembangan penelitian lanjutan.